

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat otonom daerah telah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mempercepat proses pembangunan wilayah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara utuh, sebagaimana teramanahkan dalam Pembukaan UU Dasar 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, guna mempercepat terwujudnya tujuan tersebut, salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melakukan upaya pemekaran daerah (wilayah). Hal ini didasarkan pada alasan strategis, yaitu: (1) memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, (2) mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah yang dimiliki, dan (3) adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang upaya tersebut, sebagaimana tertera pada PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Wilayah Boliyohuto dengan posisinya yang berada di wilayah terbarat Kabupaten Gorontalo sampai saat ini masih membutuhkan sentuhan pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang nyata agar dapat sejajar dengan daerah tetangga di wilayah kabupaten induk yang sudah lebih maju. Namun, hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa salah satu faktor pembatas pembangunan di wilayah ini adalah rentang kendali yang cukup jauh dari pusat pelayanan (Limboto) sebagai ibukota Kabupaten Gorontalo. Selain itu, wilayah ini mempunyai potensi sumberdaya yang cukup memadai sebagai modal dasar pembangunan, jika dikelola dengan baik dan benar. Lebih penting dari semua itu, bahwa pembentukan daerah otonom baru bermuara pada utuh-kokohnya empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni: (1) tetap terpatrynya dan terpeliharanya ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, (2) mengaktualisasikan eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, (3) tetap utuhnya Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) tetap terjamin-mantapnya semangat persatuan dan kesatuan dalam dinamika **Bhinneka Tunggal Ika** (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Kabupaten Gorontalo merupakan salah daerah otonom dalam wilayah administratif Provinsi Gorontalo yang dalam proses pembangunannya mengalami kemajuan dan perkembangan cukup signifikan, baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Bergulirnya otonomi daerah, maka kabupaten ini juga telah mengalami beberapa kali proses pemekaran. Pada tahun 1999, kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Boalemo di bagian barat dan Kabupaten Bone Bolango tahun 2003 di bagian timur wilayah ini. Kemudian, pada tahun 2007 kabupaten ini juga dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Gorontalo Utara yang berada di pesisir utara jazirah Gorontalo. Namun demikian, walaupun telah mengalami tiga kali pemekaran, pada tingkat lapangan masih banyak masyarakat yang belum menikmati secara proporsional dampak pembangunan daerah, tidak terkecuali di wilayah Boliyohuto.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya mempercepat pembangunan dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan (*local democracy*) serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (*economic growth region*), maka segenap masyarakat Boliyohuto menyatukan tekad dan tujuan untuk membentuk sebuah kabupaten. Nama yang diusulkan adalah **Kabupaten Boliyohuto** dalam wilayah administratif Provinsi Gorontalo, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Isu-Isu Strategis yang Diangkat

- Potensi sumberdaya alam merupakan modal dasar pembangunan, sehingga optimalisasi pemanfaatan dan konservasinya mutlak dilakukan agar proses pembangunan wilayah berjalan optimal serta berkelanjutan.
- Wilayah calon Kabupaten Boliyohuto merupakan salah satu pusat kawasan cepat tumbuh di Provinsi Gorontalo yang menjadi *prime mover* ekonomi wilayah Paguyaman keseluruhan sebagai bagian dari segi tiga kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Gorontalo-Paguyaman-Kwandang (Gopadang).
- Wilayah calon Kabupaten Boliyohuto merupakan salah satu kawasan utama pembangunan transmigrasi Provinsi Gorontalo dan nasional yang telah memberikan dampak positif dan progresif terhadap berkembangnya wilayah ini dan pembangunan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas dan belajar pada pengalaman daerah lain yang lebih maju, maka isu strategis yang menjadi titik pijak dalam pembangunan wilayah calon Kabupaten Boliyohuto adalah "**Memacu Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh melalui Optimalisasi Sumberdaya**".

1.3 Landasan Operasional

1.3.1 Landasan Historis

- Wilayah Boliyohuto pada awal abad ke-17 merupakan salah bagian dari pohala Limutu (Kerajaan Limboto)

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

- b. Pada zaman penjajahan Belanda, kira-kira tahun 1925 saat Gorontalo dibagi ke dalam beberapa onder, maka wilayah Boliyohuto yang masih tergabung dalam Distrik Boalemo pada Onder Distrik Paguyaman.
- c. Keluarnya UU nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka Kecamatan Paguyaman termasuk dalam wilayah IV bersama dengan Kecamatan Tilamuta, Paguat, Marisa, dan Kecamatan Popayato.
- d. Pada tahun 1996 kecamatan ini dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Paguyaman (kecamatan induk) dan Kecamatan Boliyohuto.
- e. Beberapa fase perjuangan, yaitu: *fase pertama*, perjuangan Komite Solidaritas Pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya dengan ketua Drs. Safwan Bano dan Sekretaris Ir. Warsito Somawiyono (tahun 2002); *fase kedua*, perjuangan Tim 17 yang dipelopori Pion Taliki, Rum Pagau, dkk (tahun 2004); *fase ketiga*, perjuangan Tim 13 yang dipelopori H. Salim Manumba, Mujiono Rivai, dkk; *fase keempat*, perjuangan Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Paguyaman Raya dengan ketua Purnomo Poniran, S.Pd dan Sekretaris Nurdin, SP (17 Mei 2007-pertengahan 2010). Pada fase pertama hingga fase ke empat tersebut, intensitas dukungan politik juga beraneka ragam sehingga cukup banyak menghadapi tantangan dalam perjuangan. *Fase kelima*, yaitu lahirnya Presidium Percepatan Pembentukan Kabupaten Boliyohuto (P3KB) yang dipimpin Drs. H. Sun Biki, MEc.Dev (Ketua) dan Purnomo Poniran, SPd (Sekretaris), serta Venny Anwar (Bendahara).
- f. Dalam proses memperjuangkan aspirasi pembentukan kabupaten ini, melalui Surat Penunjukan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) No. 967/H47.A2/LL/2010 tentang Tim Penyusun Naskah Akademik tanggal 25 Oktober 2010 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 554/01.2/XII/2010 tentang Tim Pengkaji dan Penyusun Kajian Daerah tanggal 8 Desember 2010, maka P4KB dibantu oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Kabupaten Boliyohuto yang diketuai oleh Prof. Dr. Yulianto Kadji, MS dan Sekretaris Nurdin, SP, MSi.
- g. Tim ini telah bekerja dan melakukan beberapa kegiatan akademik, yaitu (a) Seminar Nasional pembentukan Kabupaten Boliyohuto yang menghasilkan dua keputusan penting berupa nama dan ibukota kabupaten (14 November 2010) di Aula Kantor Desa Gandasari Kecamatan Tolangohula, (b) Pemaparan naskah akademik pembentukan Kabupaten Boliyohuto dihadapan Bupati Gorontalo beserta jajarannya (23 Desember 2010) di ruang Pola Kantor Bupati Gorontalo, dan (c) Bersama Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo memaparkan naskah akademik dihadapan Gubernur Gorontalo dan jajarannya di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2011.

1.3.2 Landasan Legal

Pembentukan Kabupaten ini didasarkan pada beberapa Landasan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang (UU) Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo
- c. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- e. UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo
- f. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- g. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- h. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- i. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- j. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- k. PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- l. PP No 78 Tahun 2007 tentang kriteria Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan dan Pembentukan
- m. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- n. Rapat Umum Masyarakat Boliyohuto tentang pengukuhan Presidium Percepatan Pembentukan dan Pembangunan Kabupaten Boliyohuto tanggal 2 April 2010.
- o. Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo No.06/KEP/DPRD/VI/2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap Pembentukan Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Panipi Provinsi Gorontalo tanggal 9 Juni 2010.
- p. Keputusan Bupati Gorontalo No.256/01.2/VI/2010 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Panipi Provinsi Gorontalo tanggal 11 Juni 2010.
- q. Peraturan Bupati Gorontalo No.46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Percepatan Pembangunan Wilayah Boliyohuto tanggal 13 Juni 2010.

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

*Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011*

- r. Keputusan Bupati Gorontalo No.821.2/BKD-DIKLAT/SK/34/2010 tentang Pengangkatan Pejabat pada Badan Percepatan Pembangunan Wilayah Boliyohuto Kabupaten Gorontalo tanggal 30 Juli 2010.
- s. Surat Penunjukkan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No.967/H47.A2.LL/2010 tentang Penunjukkan Tim Pengkaji Akademik Pembentukan Kabupaten Boliyohuto.
- t. Hasil Seminar Nasional tanggal 14 November 2010 tentang Penetapan Nama Kabupaten dan Ibukota Calon Kabupaten Boliyohuto.
- u. Surat Penunjukkan Rektor Universitas Negeri Gorontalo No.1072/H47.A2.LL/2010 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Kabupaten Boliyohuto.
- v. Surat Keputusan Bupati Gorontalo No. 554/01.2/XII/2010 tentang Tim Pengkaji dan Penyusun Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto.

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Pembentukan Kabupaten Boliyohuto ini, secara umum bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di semua sektor pembangunan agar tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dapat segera terwujud. Selain itu, sebagai upaya strategis dalam rangka mensejajarkan hasil pembangunannya dengan daerah lain dalam wilayah administratif Provinsi Gorontalo dan nasional, sehingga kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diminimalisir.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, tujuan dibentuknya Kabupaten Boliyohuto, yaitu:

- a. Optimalisasi kemampuan daerah dalam membangun wilayahnya sebagai kontribusi aktif terhadap pembangunan daerah Provinsi Gorontalo dan nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya, baik sumberdaya alam (SDA), sumberdaya manusia (SDM), dan sumberdaya teknologi yang dimiliki daerah ini.
- c. Memperpendek rentang kendali pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

*Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*

**GAMBARAN UMUM WILAYAH
CALON KABUPATEN BOLIOHUTO****2.1 Aspek Geografis Wilayah****2.1.1 Letak Geografis**

Kondisi wilayah ditinjau dari aspek geografis terletak diantara 0° 28' LU sampai 0° 55' LU dan 122° 15' BT sampai 122° 45' BT. Luas wilayah calon Kabupaten Boliyohuto adalah 648,98 km² (BPS Kabupaten Gorontalo, 2010) dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Pulubala dan Bongomeme serta Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Paguyaman, Paguyaman Pantai dan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

2.1.2 Aksesibilitas Wilayah

Pencapaian lokasi wilayah calon kabupaten ini mempunyai aksesibilitas yang cukup baik dengan jalur darat maupun laut. Lokasi wilayah calon kabupaten ini dapat dicapai melalui jalur darat yang melintasi sepanjang jalan trans sulawesi dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi jalan trans sulawesi yang relatif baik membuat perjalanan dari dan menuju wilayah ini relatif cepat tanpa hambatan yang berarti. Kecuali itu, untuk mencapai lokasi di luar jalur jalan trans sulawesi masih banyak jalur jalan yang tidak memadai lagi untuk dilalui secara layak. Pencapaian lokasi melalui jalur laut dapat dicapai dengan kapal laut yang dapat berlabuh di pelabuhan Bilato Kecamatan Boliyohuto, kemudian dilanjutkan dengan jalur darat. Lokasi bandara udara Jalaludin Isimu yang relatif tidak jauh dari wilayah ini (± 25 km) menjadi satu-satunya akses melalui jalur udara menuju wilayah ini dari luar Gorontalo. Sedangkan jalur laut dapat ditempuh melalui tiga pelabuhan laut utama di Gorontalo, yaitu pelabuhan Samudera Anggrek dan pelabuhan Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara, serta pelabuhan Kota Gorontalo.

Tabel 1. Aksesibilitas menuju Lokasi Wilayah Calon Kabupaten Boliyohuto

Jalur/Route	Jarak (km)	Waktu (jam)	Kondisi Jalan	Sarana/ Kendaraan
Jalur Darat:				
Manado-Isimu-Boliyohuto	125 Km	3 jam	Hotmix	Roda empat
Makasar-Palu-Paguyaman-Boliyohuto	86 Km	1,5 jam	Hotmix	Roda empat
Kota Gorontalo-Limboto-Isimu-Boliyohuto	2 Km	-	Hotmix	Roda dua/empat
Marisa-Tilamuta-Paguyaman-Boliyohuto	25 Km	-	Hotmix	Roda dua/empat
Jalur Laut:				
Luar Gorontalo-Anggrek-Boliyohuto		4-5 hari		Kapal laut
Luar Gorontalo-Kwandang-Boliyohuto		4-5 hari		Kapal laut
Luar Gorontalo-Kota-Boliyohuto		6 hari		Kapal laut
Jalur Udara:				
Jakarta↔Makasar↔Isimu-Boliyohuto ¹⁾	-	4 jam	-	Pesawat: - Lion Air ^{a)} - Wings Air ^{c)} - Sriwijaya Air ^{a)} - Batavia Air ^{b)}
Jakarta↔Manado↔Isimu-Boliyohuto ²⁾	-	3 jam	-	

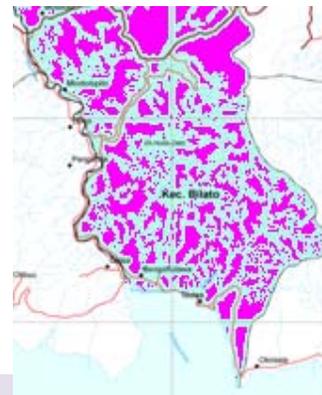
^{1)a)} penerbangan setiap hari; ^{1)b)} penerbangan tiga kali seminggu; ^{2)c)} penerbangan via manado.



Ringkasan Eksekutif

*Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011*

 Bilato



Tim Penyusun

*Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

2.2 Aspek Administrasi Pemerintahan

Sampai tahun 2010, jumlah kecamatan dan desa definitif yang ada di wilayah administrasi Provinsi Gorontalo masing-masing sebanyak 66 kecamatan dan 635 desa/kelurahan (Tabel 2). Tampak bahwa jumlah kecamatan paling banyak adalah Kabupaten Bone Bolango (17) dan paling sedikit Kabupaten Gorontalo Utara (5). Untuk calon Kabupaten Boliyohuto terdapat lima kecamatan (Tabel 3). Dengan demikian, maka secara *de facto* dan *de jure* syarat minimal jumlah kecamatan yang harus dipenuhi untuk pembentukan sebuah kabupaten (daerah otonom) telah dipenuhi.

Tabel 2. Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Boalemo	Tilamuta	2.567,36	7	84
2	Gorontalo ¹	Limboto	1.475,62	13	150
3	Pohuwato	Marisa	4.244,31	13	105
4	Bone Bolango	Suwawa	1.984,31	17	153
5	Gorontalo Utara	Kwandang	1.230,07	5	56
6	Boliyohuto ²	Tolangohula	648,98	5	38
7	Kota Gorontalo	Gorontalo	64,79	6	49
Provinsi Gorontalo		Gorontalo	12.779,44	67	635

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang diusulkan

Tabel 3. Jumlah Desa, Ibukota dan Luas masing-masing Kecamatan di Wilayah Calon Kabupaten Boliyohuto

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah	
				Desa	Dusun
1	Boliyohuto	Sidomulyo	93,41	13	41
2	Mootilango	Paris	209,42	10	44
3	Tolangohula	Sukamakmur	140,05	15	43
4	Asparaga	Karya Indah	102,75	10	21
5	Bilato	Totopo	103,35	10	31
Total			649,98	58	180

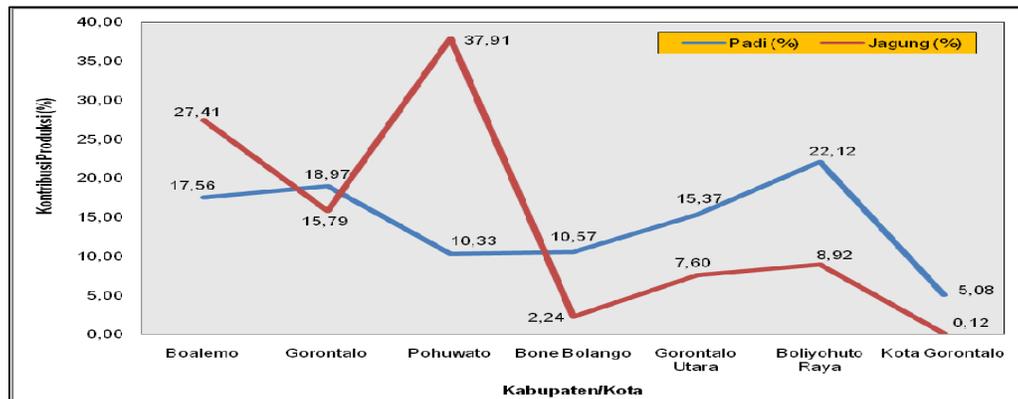
Sumber: Kabupaten Gorontalo dalam Angka 2010 (BPS Kabupaten Gorontalo, 2010).

2.3 Keragaan Sektor Pertanian

a. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Padi dan Jagung

Pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan menjadi target utama pembangunan mengingat peranannya dalam menghasilkan sumber bahan pangan pokok masyarakat. Sampai tahun 2010, produksi padi Provinsi Gorontalo sudah mencapai 237.872 ton dengan rata-rata produksi sebesar 5,07 ton/ha (Gambar 2). Dari angka tersebut, kontribusi produksi padi tertinggi diberikan oleh wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 22,12% dan terendah adalah Kota Gorontalo yang hanya sebesar 5,08%. Hal ini cukup beralasan karena wilayah calon kabupaten ini sebagian besar areal persawahannya beririgasi teknis. Sementara Kota Gorontalo, walaupun merupakan salah satu areal persawahan terbaik di provinsi ini, tetapi sejalan dengan perkembangan kota maka banyak lahan sawah yang dikonversi (sempit).



Gambar 2. Kontribusi Produksi Padi dan Jagung dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun

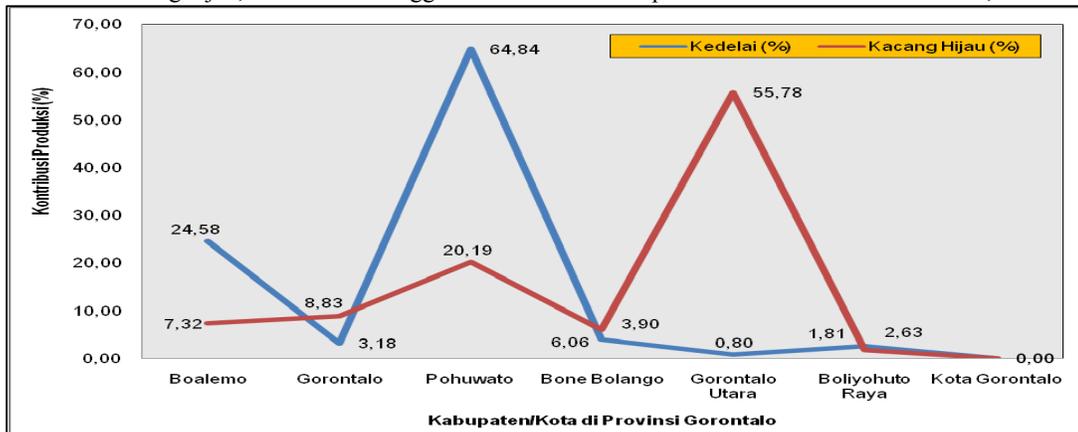
Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

Kedelai dan Kacang Hijau

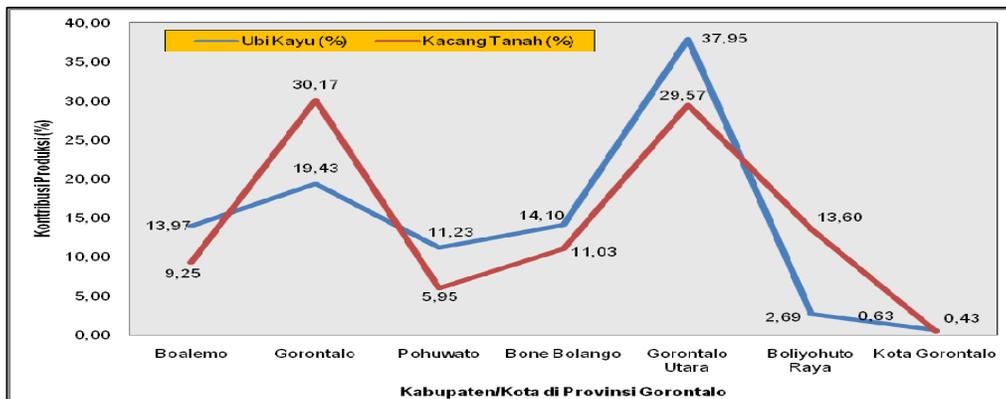
Sampai tahun 2010, produksi kedelai Provinsi Gorontalo sudah mencapai 2.514 ton dengan rata-rata produksi sebesar 1,34 ton/ha (Gambar 3). Dari angka tersebut, kontribusi produksi padi tertinggi diberikan oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 64,84% dan terendah adalah Kota Gorontalo yang hanya sebesar 1,00%. Sementara kacang hijau, kontribusi tertinggi diberikan oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 55,78%.



Gambar 3. Kontribusi Produksi Kedelai dan Kacang Hijau dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

Ubi Kayu dan Kacang Tanah

Sampai tahun 2010, produksi ubi kayu Provinsi Gorontalo sudah mencapai 9.353 ton dengan rata-rata produksi sebesar 10,73 ton/ha (Gambar 4). Dari angka tersebut, kontribusi produksi ubi kayu tertinggi diberikan oleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 37,95% dan terendah adalah Kota Gorontalo yang hanya sebesar 0,63%. Sementara kacang tanah, kontribusi tertinggi dan terendah diberikan oleh kabupaten dan kota yang sama seperti pada komoditas ubi kayu.



Gambar 3. Kontribusi Produksi Ubi Kayu dan Kacang Tanah dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

b. Sub Sektor Pertanian Tanaman Perkebunan

Kelapa dan Jambu Mete

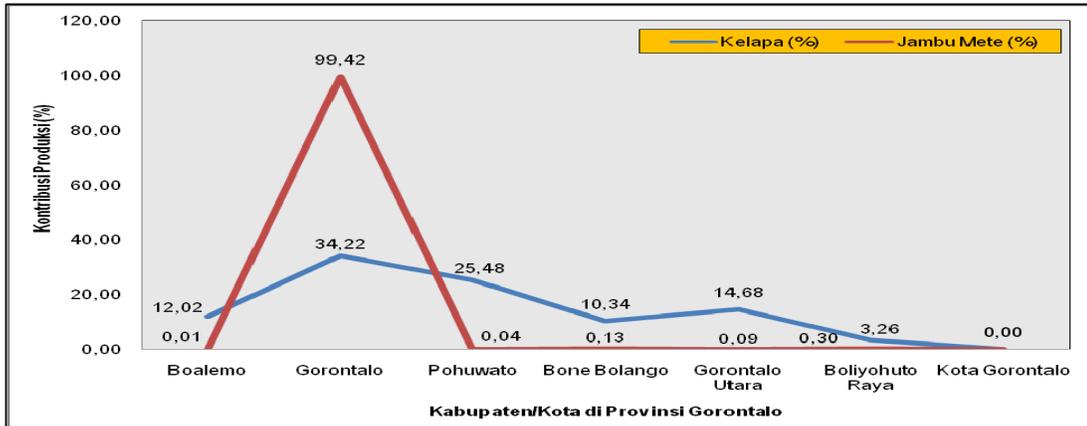
Kelapa merupakan salah satu komoditas yang menjadi prioritas pengembangan dalam program revitalisasi pertanian. Sampai tahun 2009, produksi kelapa Provinsi Gorontalo sudah mencapai 56.504,31 ton dengan rata-rata produksi sebesar 0,96 ton/ha (Gambar 5). Dari angka tersebut, kontribusi produksi padi tertinggi diberikan oleh Kabupaten Gorontalo sebesar 34,22%. Hal ini cukup beralasan karena wilayah kabupaten ini sebagian besar merupakan sentra pengembangan perkelapaan di Provinsi Gorontalo, terutama di wilayah pesisir Danau Limboto bagian barat. Pengembangan kelapa di wilayah ini telah berjalan baik dengan sustainabilitas produksi kelapa yang relatif stabil. Hal lain juga adalah minat dan animo petani dalam budidaya kelapa sangat tinggi karena menjadi salah satu sumber pendapatan utama petani di wilayah ini.

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

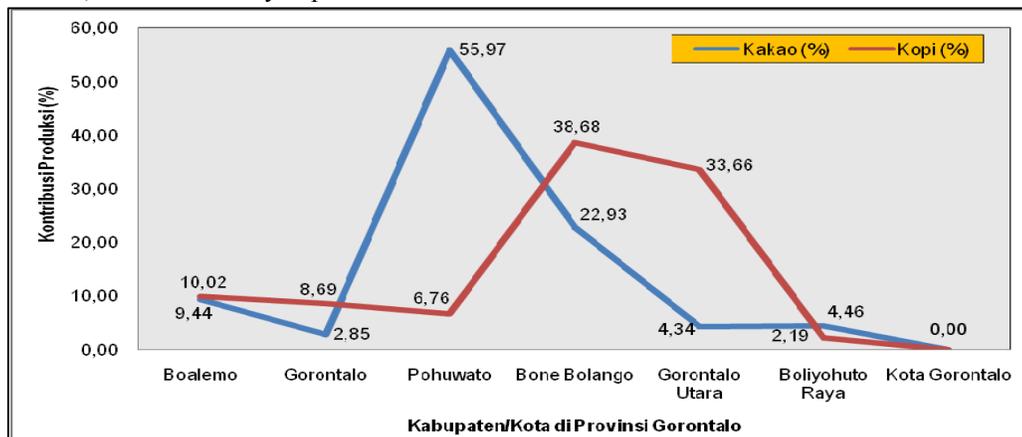
Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011



Gambar 5. Kontribusi Produksi Kelapa dan Jambu Mete dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

Kakao dan Kopi

Sampai tahun 2010, produksi kakao Provinsi Gorontalo sudah mencapai 2.710 ton dengan rata-rata produksi sebesar 0,28 ton/ha (Gambar 6). Dari angka tersebut, kontribusi produksi kakao tertinggi diberikan oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 55,97%. Hal ini cukup beralasan karena wilayah kabupaten ini sebagian besar merupakan sentra pengembangan kakao di Provinsi Gorontalo, terutam di wilayah pesisir dataran aluvial.



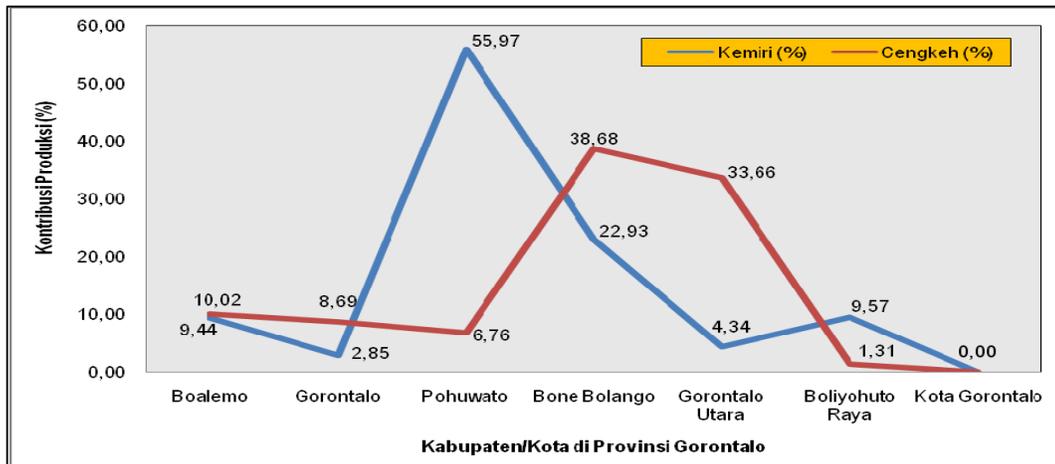
Gambar 6. Kontribusi Produksi Kakao dan Kopi dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

Kemiri dan Cengkeh

Sampai tahun 2010, produksi kemiri Provinsi Gorontalo sudah mencapai 2.849,74 ton dengan rata-rata produksi sebesar 0,29 ton/ha (Gambar 7). Dari angka tersebut, kontribusi produksi kemiri tertinggi diberikan oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 55,97%. Hal ini cukup beralasan karena wilayah kabupaten ini sebagian besar merupakan sentra pengembangan kemiri di Provinsi Gorontalo, terutam di wilayah perbukitan.

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

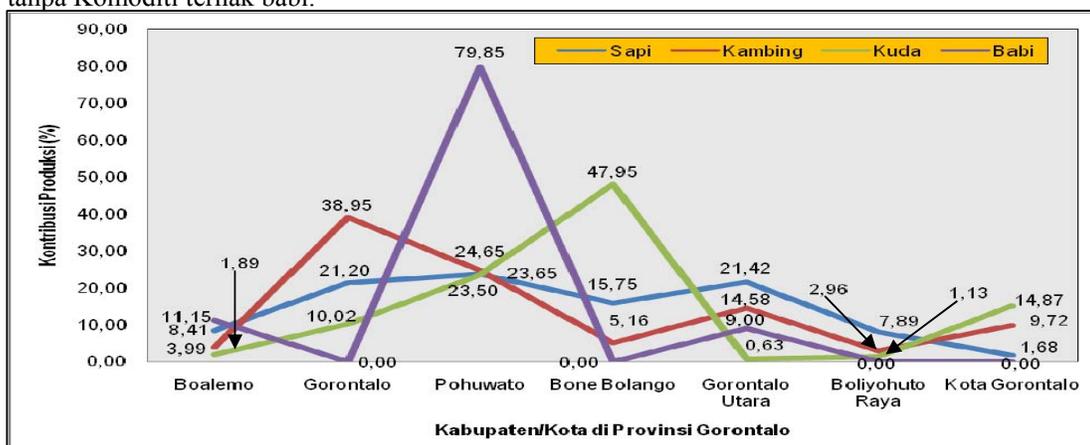


Gambar 7. Kontribusi Produksi Kemiri dan Cengkeh dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

c. Sub Sektor Peternakan

Ternak Besar

Sampai tahun 2010, produksi sapi Provinsi Gorontalo sudah mencapai 221.645 ekor, kambing 84.056 ekor, kuda 8.901 ekor, dan babi sebanyak 12.655 ekor (Gambar 8). Dari angka tersebut, kontribusi produksi sapi dan babi tertinggi diberikan oleh Kabupaten Pohuwato yang masing-masing sebesar 23,65% dan 79,85%. Hal ini cukup beralasan karena wilayah kabupaten ini merupakan sentra pengembangan sapi dan di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, kontribusi produksi kambing tertinggi diberikan oleh Kabupaten Gorontalo sebesar 38,95% dan kuda oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 47,95%. Dari ke empat Komoditi ternak besar tersebut, kontribusi produksi calon Kabupaten Boliyohuto untuk sapi hanya 7, 89%, kambing 2,96% dan kuda sebesar 1,13% tanpa Komoditi ternak babi.



Gambar 8. Kontribusi Produksi Ternak Besar dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

Ternak Unggas

Sampai tahun 2010, produksi ayam buras Provinsi Gorontalo sudah mencapai 1.093.422 ekor, ayam broiler 3.580.061 ekor, dan itik sebanyak 65.975 ekor (Gambar 9). Dari angka tersebut, kontribusi produksi ayam buras tertinggi diberikan oleh Kabupaten Gorontalo sebesar 25,73%. Hal ini cukup beralasan karena wilayah kabupaten ini merupakan sentra pengembangan ayam buras di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, kontribusi produksi ayam broiler tertinggi diberikan oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 51,48% dan itik oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 31,92%. Dari ke empat Komoditi ternak besar tersebut, kontribusi produksi calon Kabupaten Boliyohuto untuk

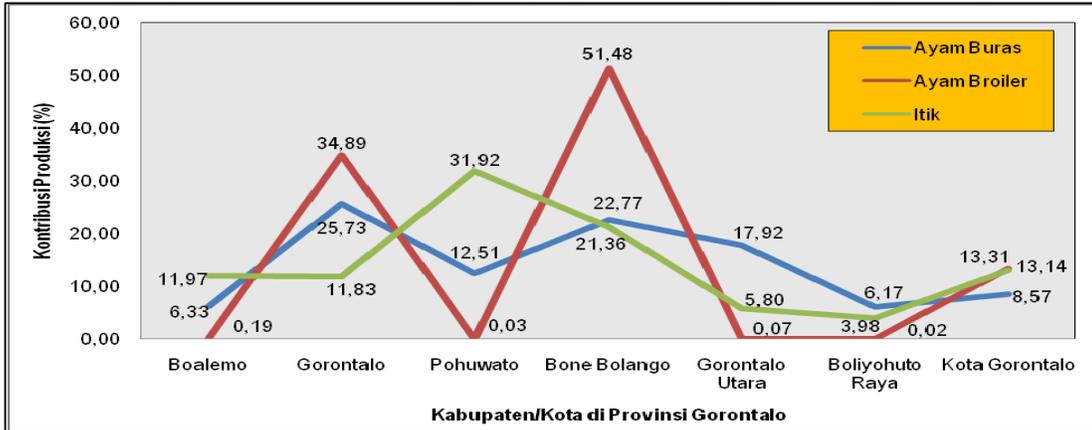
Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

ayam buras adalah yang terendah, yaitu hanya 6,17%, ayam broiler 0,02% dan itik hanya sebesar 3,98% saja. Padahal wilayah ini mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan ternak unggas dan didukung oleh ketersediaan sumber pakan yang memadai. Dengan adanya upaya pemekaran wilayah ini menjadi sebuah kabupaten, maka diharapkan ke depan pengembangan ternak unggas jenis ini akan lebih baik lagi dengan produktifitas yang lebih tinggi tentunya.



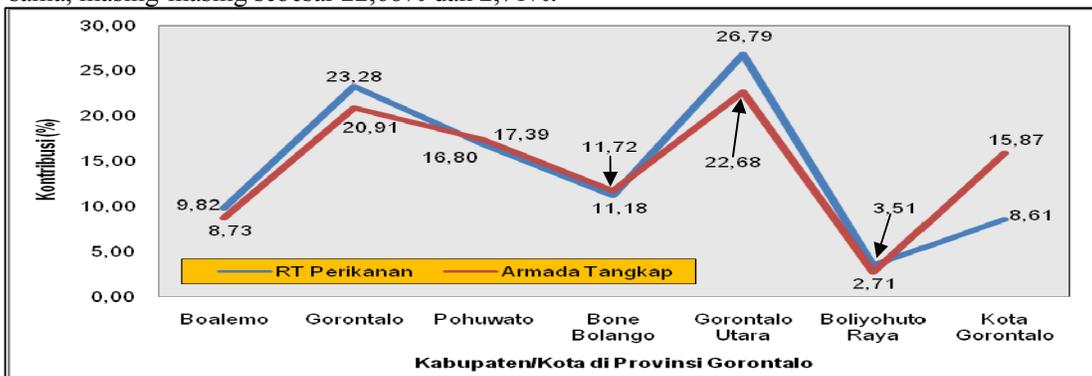
Gambar 9. Kontribusi Produksi Unggas dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

2.4 Keragaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan yang ditempuh sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2004-2009 pada sektor perikanan adalah mendorong diversifikasi, peningkatan produktivitas, dan nilai tambah produk perikanan untuk perbaikan kesejahteraan nelayan. Secara khusus untuk sektor perikanan, arah kebijakan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan penduduk pulau-pulau kecil, utamanya yang berada di perbatasan negara. Peningkatan kesejahteraan ditempuh secara holistik melalui keterpaduan kegiatan yang berfokus pada penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan salah satu program unggulan daerah adalah etalase perikanan.

a. Rumah Tangga Perikanan dan Armada Tangkap Ikan

Sampai tahun 2010, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) sudah mencapai 9.488 dan armada tangkap ikan sudah sebanyak 9.901 unit (Gambar 10). Dari angka tersebut, untuk RTP terbanyak diberikan oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan kontribusi sebesar 26,79% dan paling sedikit adalah calon Kabupaten Boliyohuto yang baru sebesar 3,51% saja. Sementara, untuk armada tangkap ikan terbanyak dan paling sedikit juga diberikan oleh kabupaten dan calon kabupaten yang sama, masing-masing sebesar 22,68% dan 2,71%.



Gambar 10. Kontribusi Rumah Tangga Perikanan dan Armada Tangkap dari Calon Kabupaten Boliyohuto terhadap Produksi Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

**KAJIAN PERSYARATAN TEKNIS
PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLIYOHUTO****3.1 Rasionalisasi Kajian**

Pada prinsipnya, pembentukan daerah kabupaten berupa pemekaran kabupaten harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 PP No. 78 tahun 2007. Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri dari: (1) keputusan DPRD kabupaten induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, (2) keputusan bupati induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, (3) keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, (4) keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten, dan (5) rekomendasi Menteri.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan Rentangg kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 3 menegaskan bahwa suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu. Sedangkan Pasal 7 menyatakan bahwa syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

3.2 Metodologi dan Pendekatan yang Digunakan

Kajian valuasi calon kabupaten yang diusulkan dilakukan untuk memperoleh informasi kelayakan (*feasibility study*) daerah menjadi satu daerah otonom. Landasan valuasi kelayakan ini didasarkan atas faktor dan indikator yang tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2007. Adapun faktor dan indikator disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Persyaratan Teknis dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru

No	Faktor	Indikator		
1	Kependudukan	1 Jumlah Penduduk		
		2 Kepadatan Penduduk		
2	Kemampuan Ekonomi	3 PDRB non migas perkapita		
		4 Pertumbuhan ekonomi		
		5 Kontribusi PDRB non migas		
3	Potensi Daerah	6 Rasio Bank dan Lembaga non keuangan bank per 10.000 penduduk		
		7 Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk		
		8 Rasio pasar per 10.000 penduduk		
		9 Rasio sekolah SD per penduduk usia SD		
		10 Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP		
		11 Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA		
		12 Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk		
		13 Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk		
		14 Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor		
		15 Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga		
		16 Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor		
		17 Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas		
		18 Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas		
		19 Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk		
		4	Kemampuan Keuangan	20 Jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS)
				21 Rasio PDS terhadap jumlah penduduk
				22 Rasio PDS terhadap PDRB non migas
		5	Sosial Budaya	23 Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

		24	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk
		25	Jumlah balai pertemuan
6	Sosial Politik	26	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif yang mempunyai hak pilih
		27	Jumlah organisasi kemasyarakatan
7	Luas Daeah	28	Luas wilayah keseluruhan
		29	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8	Pertahanan	30	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah
		31	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan
9	Keamanan	32	Rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	33	Indeks pembangunan manusia (IPM)
11	Rentang Kendali	34	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)
		35	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007

Tabel 12. Bobot Masing-Masing Faktor dan Indikator

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	Jumlah Penduduk	15
	Kepadatan Penduduk	5
2	Kemampuan Ekonomi	15
	PDRB non migas perkapita	5
	Pertumbuhan ekonomi	5
	Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi Daerah	15
	Rasio Bank dan Lembaga non keuangan bank per 10.000 penduduk	2
	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
	Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk	1
4	Kemampuan Keuangan	15
	Jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS)	5
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial Budaya	5
	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial Politik	5
	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif yang mempunyai hak pilih	3
	Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas Daeah	5
	Luas wilayah keseluruhan	2
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

9	Keamanan	5
	Rasio jumlah aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5
	Indeks pembangunan manusia (IPM)	5
11	Rentang Kendali	5
	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	2
	Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)	3
Total		100

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007

Nilai rata-rata perbandingan dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata. Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator disajikan pada Tabel 4. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sebagaimana tertera pada Tabel 13.

Tabel 13. Nilai Indikator dan Kelulusan suatu Daerah Otonom

<i>Kategori</i>	<i>Total Nilai Seluruh Indikator</i>			<i>Keterangan</i>
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber: PP No. 78 Tahun 2007

3.3 Analisis Persyaratan Fisik Wilayah

Persyaratan fisik wilayah terdiri dari cakupan wilayah, calon ibu kota dan sarana prasarana wilayah yang pada prinsipnya tetap mengacu pada pedoman pelaksanaan PP No. 78 tahun 2007 (Tabel 14).

Tabel 14. Pedoman Penilaian Calon Ibukota Kabupaten Boliyohuto

Syarat Kriteria	Indikator	Sub Indikator
Aspek Ruang	1. Ruang	
	a. Calon ibukota kabupaten mampu memberikan pelayanan bagi seluruh wilayah kabupaten baru	1. Jarak rata-rata calon Ibukota Kabupaten terhadap Ibukota
	b. Luas Wilayah memadai untuk mendukung aktifitas Sosial Ekonomi Budaya dan Politik kabupaten tersebut	2. Rasio luas lahan budidaya terhadap luas daerah
	c. Calon Ibukota Kabupaten memiliki pola interaksi yang produktif dengan wilayah hinterlandnya.	3. Jarak tempuh rata-rata calon Ibukota Kabupaten terhadap seluruh Ibukota Kecamatan
	d. Lokasi calon Ibukota Kabupaten secara fisik tidak berdekatan dengan Ibukota Kabupaten lain/ kota	4. Jarak tempuh dengan Ibukota Kabupaten lain yang terdekat
	e. Mempunyai akses yang baik terhadap potensi sumber daya air	5. Jarak Sumber Daya Air dengan pusat permukiman
	2. Luas Daerah	6. Luas wilayah keseluruhan
	7. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	
Jumlah Penduduk	3. Jumlah Penduduk	8. Jumlah Penduduk
	4. Sebagian besar jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor non pertanian	9. Rasio jumlah penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian/SDA dengan total penduduk calon kabupaten

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

	5. Tingkat pertumbuhan penduduk tidak minus	10. Tingkat pertumbuhan
		11. Rasio jumlah PNS terhadap total jumlah penduduk
	6. Tenaga Kerja	12. Rasio tenaga kerja produktif terhadap total jumlah penduduk
		13. Persentase penduduk bekerja
Potensi Daerah	7. Sarana dan Prasarana Transportasi	14. Jumlah pelabuhan udara
		15. Jumlah pelabuhan laut/ penyeberangan/sungai
		16. Jumlah terminal
		17. Panjang jalan
		18. Jumlah mobil
		19. Jumlah motor
		20. Jumlah kapal motor
		21. Jumlah perahu
	8. Perumahan dan Permukiman	22. Jumlah Perumahan Dinas
		23. Jumlah Perumahan Pribadi
	9. Lembaga Keuangan	24. Jumlah bank
		25. Jumlah non bank
		26. Jumlah KUD
		27. Jumlah non KUD
	10. Sarana dan Prasarana Ekonomi	28. Jumlah pasar modern
		29. Jumlah pasar tradisional
		30. Jumlah toko
		31. Jumlah kios
	11. Sarana Pendidikan	32. Jumlah SD
		33. Jumlah SLTP
		34. Jumlah SLTA
		35. Jumlah Perguruan Tinggi
	12. Sarana Kesehatan	36. Jumlah rumah sakit
		37. Jumlah puskesmas
		38. Jumlah puskesmas pembantu
		39. Jumlah apotik/toko obat
		40. Jumlah dokter
		41. Jumlah paramedis
	13. Sarana Peribadatan	42. Jumlah masjid
		43. Jumlah gereja
		44. Jumlah pura
		45. Jumlah sarana peribadatan lainnya
	14. Sarana Pariwisata	46. Jumlah hotel/akomodasi lainnya
		47. Jumlah restoran/rumah makan
		48. Jumlah obyek wisata
	15. Sarana Kegiatan Seni/ Institusi Sosial	49. Jumlah gedung kesenian
		50. Jumlah panti sosial
	16. Sarana Olah Raga	51. Jumlah lapangan
	17. Sarana Komunikasi	52. Jumlah pelanggan telepon
		53. Jumlah kantor pos
		54. Jumlah kantos pos pembantu
	18. Sarana Penerangan	55. Jaringan listrik
		56. Jumlah pelanggan listrik
	19. Prasarana dan Sarana Dasar	57. Fasilitas pelayanan air limbah
		58. Jumlah fasilitas persampahan
		59. Jumlah pelanggan air bersih
Sosial Budaya	20. Organisasi Kemasyarakatan	60. Jumlah organisasi kemasyarakatan
Lain-lain	21. Keamanan dan Ketertiban	61. Angka kriminalitas per 10.000 penduduk
	22. Ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan	62. Jumlah gedung yang ada
		63. Ketersediaan lahan

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PP No.78 tahun 2007 (Dirjend Penataan Ruang Dept. PU).

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

3.4 Hasil Analisis Persyaratan Teknis Pembentukan Kabupaten

a. Faktor Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Untuk indikator jumlah penduduk, ternyata calon Kabupaten Boliyohuto mempunyai nilai cukup tinggi (60), sementara Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk), Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo (Tabel 15) mempunyai nilai tertinggi (75). Nilai terendah terdapat pada Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang hanya sebesar 30 karena jumlah penduduk yang relatif sedikit. Di samping itu, rendahnya nilai jumlah penduduk ini juga disebabkan oleh banyaknya kecamatan yang terdapat dalam kabupaten tersebut, sehingga semakin banyak kecamatan, maka semakin kecil rata-rata jumlah penduduk di kabupaten tersebut.

Tabel 15. Indikator Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Kecamatan	Rata-rata	Pembanding	Skor	Bobot	Nilai akhir
1	Boalemo	128.495	7	18.442	27,04	5	15	75
2	Gorontalo ¹	266.659	13	20.512	30,07	5	15	75
3	Pohuwato	116.227	13	9.517	13,95	2	15	30
4	Bone Bolango	131.797	17	7.649	11,21	2	15	30
5	Gorontalo Utara	96.506	5	19.035	27,91	5	15	75
6	Boliyohuto²	73.811	5	14.762	21,64	4	15	60
Provinsi Gorontalo		983.952	66	13.642	20,00			
Quota					68.21			

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

2. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk calon Kabupaten Boliyohuto ternyata menempati urutan kedua setelah Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) dengan nilai 20 (Tabel 16). Sedangkan kabupaten dengan kepadatan terendah adalah Kabupaten Pohuwato dengan tingkat kepadatan penduduk hanya sebanyak 29,15 jiwa/km² dan memperoleh nilai 5 saja.

Tabel 16. Indikator Kepadatan Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Luas (km2)	Kepadatan	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
1	Boalemo	128.495	2.567,36	50,28	28	2	5	10
2	Gorontalo	266.659	1.475,62	180,71	100	5	5	25
3	Pohuwato	116.227	4.244,31	29,15	16	1	5	5
4	Bone Bolango	131.797	1.984,31	65,53	36	2	5	10
5	Gorontalo Utara	96.506	1.230,07	77,38	43	3	5	15
6	Boliyohuto	73.811	648,98	113,73	63	4	5	20
Provinsi Gorontalo		818.493	12.151	516,78	285,97			

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

b. Faktor Kemampuan Ekonomi Daerah

1. PDRB Non Migas per Kapita

Salah satu cara menilai kemampuan ekonomi daerah yang merupakan indikator makro ekonomi ditentukan melalui penilaian produk domestik regional bruto (PDRB). Sementara, penilaian kemampuan ekonomi per kapita penduduk ditentukan berdasarkan PDRB non migas atas dasar harga berlaku pada tahun terakhir (Tabel 17).

Tabel 17. Indikator PDRB Non Migas per Kapita Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	PDRB non migas (Rp)	Jumlah Penduduk (jiwa)	PDRB per kapita (Rp)	Persentase (%)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Boalemo	710.770	128.495	5.531.499	51,28	3	5	15
Gorontalo ¹	1.085.755	266.659	4.071.700	37,75	2	5	10
Pohuwato	1.036.445	116.227	8.917.420	82,67	5	5	25
Bone Bolango	826.052	131.797	6.267.609	58,10	4	5	20
Gorontalo Utara	473.270	96.506	4.904.047	45,46	3	5	15
Boliyohuto²	796.221	73.811	10.787.289	100,00	5	5	25
Provinsi Gorontalo	7.082.611	983.952	7.198.127				

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

Nilai PDRB non migas per kapita penduduk calon Kabupaten Boliyohuto merupakan nilai yang tertinggi sebesar Rp. 10.787.289 terhadap nilai rata-rata PDRB non migas per kapita kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo yang hanya sebesar Rp. 7.198.127. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) nilai PDRB non migas per kapita sebesar Rp. 4.071.700. Dengan demikian, maka calon Kabupaten Boliyohuto bersama-sama Kabupaten Pohuwato memperoleh skor dan nilai untuk indikator ini paling tinggi, yaitu masing-masing 5 dan 25.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Selama dua tahun terakhir dari tahun 2008 sampai tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) menunjukkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,63% dan terus meningkat pada tahun 2009 sebesar 7,48%. Tren kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini juga berlaku terhadap semua kabupaten definitif di wilayah Provinsi Gorontalo. Dari indikator pertumbuhan ekonomi ini, maka semua kabupaten termasuk calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh skor paling tinggi (5) dengan nilai 25.

Tabel 18. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	2008	2009	Persentase (%)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Boalemo	7,37	6,14	82,15	5	5	25
Gorontalo ¹	7,63	7,48	100,00	5	5	25
Pohuwato	7,41	7,16	95,72	5	5	25
Bone Bolango	6,33	6,88	91,94	5	5	25
Gorontalo Utara	7,35	7,35	98,28	5	5	25
Boliyohuto ²	7,63	7,48	100,00	5	5	25
Provinsi Gorontalo	7,76	7,54				

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

3. Kontribusi PDRB Non Migas terhadap PDRB Non Migas Provinsi Gorontalo

Nilai PDRB non migas calon Kabupaten Boliyohuto terhadap PDRB non migas Provinsi Gorontalo sebesar 11,24% dan menempati urutan ke empat kontributor tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo (Tabel 19). Sedangkan Kabupaten Gorontalo merupakan kontributor paling tinggi sebesar 15,33% diikuti oleh Kabupaten Pohuwato sebesar 14,63%. Kabupaten yang memberikan kontribusi PDRB non migas paling rendah terhadap PDRB non migas Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya 6,68% saja. Dengan demikian, calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh skor 4 bersama dengan Kabupaten Boalemo dan Bone Bolango dengan nilai sebesar 20.

Tabel 19. Indikator Kontribusi PDRB Non Migas Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain terhadap PDRB Non Migas Provinsi

Kabupaten	PDRB non migas	Kontribusi PDRB Non Migas (%)	Persentase (%)	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Boalemo	710.770	10,04	65,46	4	5	20
Gorontalo ¹	1.085.755	15,33	100,00	5	5	25
Pohuwato	1.036.445	14,63	95,46	5	5	25
Bone Bolango	826.052	11,66	76,08	4	5	20
Gorontalo Utara	473.270	6,68	43,59	3	5	15
Boliyohuto ²	796.221	11,24	73,33	4	5	20

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

c. Faktor Potensi Daerah

Potensi daerah terdiri dari potensi fisik dan non fisik dari suatu daerah/wilayah seperti penduduk, sumber daya buatan dan sumber daya sosial. Untuk keperluan otonomi daerah, potensi daerah yang dapat diukur (*tangible*) dimasukkan dalam indikator tersedia (PP No. 78 tahun 2007).

1. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk

Indikator rasio bank dan lembaga keuangan non bank menunjukkan bahwa calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 5,55 dengan skor 4 dan nilai 8. Sementara, Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk memiliki rasio paling tinggi sebesar 9,18 dengan nilai 10. Kabupaten Pohuwato walaupun kabupaten baru, tetapi rasionya termasuk urutan kedua setelah Kabupaten Gorontalo dengan nilai sama (10).

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

Tabel 20. Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Bank	Jumlah Non Bank	Jumlah Penduduk	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2	103	128.495	8,13355	88,53	5	2	10
Gorontalo ¹	9	236	266.659	9,18776	100,00	5	2	10
Pohuwato	11	93	116.227	8,40567	91,49	5	2	10
Bone Bolango	5	95	131.797	7,69083	83,71	5	2	10
Gorontalo Utara	4	32	96.506	3,78243	41,17	3	2	6
Boliyohuto ²	4	37	73.811	5,55473	60,46	4	2	8

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

2. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk

Indikator rasio pertokoan terhadap 10.000 penduduk di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto menempati urutan paling tinggi sebesar 0,94 dengan nilai 5 (Tabel 21). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo menempati urutan kedua (0,75) dengan nilai 5. Rasio paling rendah diperoleh Kabupaten Bone Bolango yang hanya 0,38 dengan nilai 3. Nilai rasio untuk Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo relatif sama hanya terdapat sedikit perbedaan yang disebabkan oleh jumlah pertokoan dan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 21. Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pertokoan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	7	128.495	0,54224	57,66	3	1	3
Gorontalo ¹	20	266.659	0,75418	80,19	5	1	5
Pohuwato	8	116.227	0,64659	68,75	4	1	4
Bone Bolango	5	131.797	0,38454	40,89	3	1	3
Gorontalo Utara	4	96.506	0,42027	44,69	3	1	3
Boliyohuto ²	7	73.811	0,94044	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

3. Rasio Pasar per 10.000 Penduduk

Indikator rasio pasar terhadap jumlah penduduk menunjukkan bahwa calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh nilai paling tinggi sebesar 2,032 dengan skor dan nilai 5 (Tabel 22). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) menempati urutan kedua bersama-sama Kabupaten Boalemo dengan skor 4 dan nilai 4. Indikator rasio pasar untuk Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara relatif sama masing-masing sebesar 1,05 dan 1,15 dengan skor dan nilai 3.

Tabel 22. Indikator Rasio Pasar per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Jumlah Pasar	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	18	128.495	1,39432	68,61	4	1	4
Gorontalo ¹	33	266.659	1,23754	60,90	4	1	4
Pohuwato	13	116.227	1,05071	51,70	3	1	3
Bone Bolango	15	131.797	1,15362	56,77	3	1	3
Gorontalo Utara	10	96.506	1,05067	51,70	3	1	3
Boliyohuto ²	15	73.811	2,03222	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

4. Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD

Indikator rasio sekolah dasar (SD) atau sederajat terhadap penduduk usia SD sederajat untuk wilayah Calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 0,0068 dengan skor dan nilai 5 (Tabel 23). Skor dan nilai ini relatif

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

sama dengan Kabupaten Boalemo dengan rasio 0,0082 dengan skor dan nilai 5. Sedangkan kabupaten paling rendah adalah Puhuwato dengan rasio 0,0048 dengan skor dan nilai 3.

Tabel 23. Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Jumlah		Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
	SD	Penduduk Usia SD (7-12 Tahun)					
Boalemo	130	15.737	0,00826	100,00	5	1	5
Gorontalo ¹	232	37.600	0,00617	74,69	4	1	4
Puhuwato	119	24.754	0,00481	58,19	3	1	3
Bone Bolango	132	22.508	0,00586	70,99	4	1	4
Gorontalo Utara	106	21.166	0,00501	60,62	4	1	4
Boliyohuto ²	75	10.928	0,00686	83,08	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

5. Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP

Indikator sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat terhadap penduduk usia SLTP di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 0,010 bersama-sama Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) dengan nilai dan skor 5 (Tabel 24). Sedangkan kabupaten dengan rasio terendah adalah Bone Bolango sebesar 0,001 dengan skor dan nilai 1. Data di atas menunjukkan bahwa walaupun jumlah sekolah jenjang SLTP di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto relatif sedikit dibandingkan jumlah sekolah tersebut di Kabupaten lainnya tetapi penduduk usia sekolah ini masih relatif mampu dilayani.

Tabel 24. Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten	Jumlah		Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
	SLTP	Penduduk Usia SLTP (13-16 Tahun)					
Boalemo	44	8.305	0,00530	52,21	4	1	4
Gorontalo ¹	92	13.013	0,00707	69,67	5	1	5
Puhuwato	44	23.562	0,00187	18,40	2	1	2
Bone Bolango	25	23.693	0,00106	10,40	1	1	1
Gorontalo Utara	47	21.259	0,00221	21,79	2	1	2
Boliyohuto ²	29	2.858	0,01015	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

6. Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA

Indikator sekolah jenjang SLTA atau sederajat terhadap penduduk usia SLTA di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 0,006 dengan skor dan nilai 5 yang merupakan rasio tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo (Tabel 25). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo yang merupakan kabupaten induk menempati urutan kedua dengan rasio 0,003 dengan skor dan nilai 3. Sedangkan rasio terendah dimiliki oleh Kabupaten Puhuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan rasio masing-masing 0,001 dan 0,0009 serta nilai 1.

Tabel 25. Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah		Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
	SLTA	Penduduk Usia SLTA (16-19 Tahun)					
Boalemo	14	7.014	0,00200	30,41	2	1	2
Gorontalo ¹	29	9.200	0,00315	48,03	3	1	3
Puhuwato	14	11.248	0,00124	18,97	1	1	1
Bone Bolango	15	10.705	0,00140	21,35	2	1	2
Gorontalo Utara	10	10.340	0,00097	14,74	1	1	1
Boliyohuto ²	8	1.219	0,00656	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

7. Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk

Indikator rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 16,12 dengan skor dan nilai 4 yang menempati urutan kedua bersama-sama dengan Kabupaten Puhuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) relatif

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

lebih baik. Rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 22,90 dengan skor dan nilai 1. Sedangkan rasio terendah diperoleh Kabupaten Boalemo sebesar 6,97 dengan skor dan nilai 2.

Tabel 26. Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	90	128.495	6,97	30,44	2	1	2
Gorontalo ¹	276	266.659	10,35	45,19	3	1	3
Pohuwato	221	116.227	17,86	77,98	4	1	4
Bone Bolango	237	131.797	18,23	79,58	4	1	4
Gorontalo Utara	218	96.506	22,90	100,00	5	1	5
Boliyohuto ²	119	73.811	16,12	70,39	4	1	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

8. Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk

Indikator rasio tenaga medis (kesehatan) terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto merupakan rasio terendah bersama-sama Kabupaten Gorontalo Utara yang masing-masing hanya 5,717 dan 5,463 dengan skor dan nilai 2 (Tabel 27). Sedangkan kabupaten sisanya termasuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) merupakan perolehan rasio tertinggi dengan skor dan nilai 5.

Tabel 27. Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	219	128.495	16,96425	64,54	4	1	4
Gorontalo ¹	454	266.659	17,02549	64,78	4	1	4
Pohuwato	182	116.227	14,70992	55,97	3	1	3
Bone Bolango	182	131.797	13,99731	53,26	3	1	3
Gorontalo Utara	52	96.506	5,46350	20,79	2	1	2
Boliyohuto ²	194	73.811	26,28335	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

9. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor

Pada Indikator ini, calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh rasio sebesar 11,52 dengan skor dan nilai 2. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) belum tersedia data. Rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Boalemo sebesar 29,70 dengan skor dan nilai 5.

Tabel 28. Indikator Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor atau Perahu atau Perahu Motor atau Kapal Motor Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah RT Punya Bermotor	Jumlah RT	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	8.909	29.996	29,70	100,00	5	1	5
Gorontalo ¹	9.112	66.983	13,60	45,80	3	1	3
Pohuwato	6.223	29.509	21,09	71,00	4	1	4
Bone Bolango	3.516	31.675	11,10	37,37	1	1	1
Gorontalo Utara	4.524	23.934	18,90	63,64	4	1	4
Boliyohuto ²	5.431	20.273	26,79	90,20	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

RT=rumah tangga

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

10. Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga

Pada indikator ini, calon wilayah Kabupaten Boliyohuto memperoleh rasio sebesar 44,82 dengan skor dan nilai 5. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) juga memperoleh skor dan nilai yang sama (5) hanya besaran rasionya masih lebih tinggi dari Calon Kabupaten Boliyohuto. Kabupaten sisa memperoleh skor dan nilai yang sama (4) secara keseluruhan.

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

Tabel 29. Indikator Persentase Pelanggan Listrik terhadap Jumlah Rumah Tangga Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pelanggan Listrik	Jumlah RT	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	9.619	29.996	32,07	68,17	4	1	4
Gorontalo ¹	31.507	66.983	47,04	100,00	5	1	5
Pohuwato	10.879	29.509	36,87	78,38	4	1	4
Bone Bolango	11.831	31.675	37,35	79,41	4	1	4
Gorontalo Utara	8.621	23.934	36,02	76,58	4	1	4
Boliyohuto ²	9.086	20.273	44,82	95,28	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

RT=rumah tangga

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

11. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Indikator rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor ini, calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh rasio sebesar 0,107 dengan skor dan nilai yang sama dengan Kabupaten Gorontalo (induk), Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara (4). Rasio paling tinggi diperoleh Kabupaten Pohuwato sebesar 0,148 dengan skor dan nilai 5.

Tabel 30. Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan Bermotor	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	832,39	8.909	0,0934325	63,05	4	1	4
Gorontalo ¹	971,22	9.112	0,1065869	71,93	4	1	4
Pohuwato	922,13	6.223	0,1481809	100,00	5	1	5
Bone Bolango	302,96	3.516	0,0861661	58,15	3	1	3
Gorontalo Utara	416,76	4.524	0,092122	62,17	4	1	4
Boliyohuto ²	582,30	5.431	0,1072178	72,36	4	1	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

12. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas

Pada indikator ini, calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh rasio sebesar 0,0044 dengan skor dan nilai 5 bersama-sama dengan Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) rasionya lebih kecil yang hanya sebesar 0,0016 dengan skor dan nilai 2.

Tabel 31. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun ke Atas Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pekerja SLTA	Jumlah Penduduk ≥18 tahun	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	285	86.103	0,00331	73,76	4	1	4
Gorontalo ¹	261	159.120	0,0016403	36,55	2	1	2
Pohuwato	368	83.793	0,0043918	97,87	5	1	5
Bone Bolango	191	88.947	0,0021473	47,85	3	1	3
Gorontalo Utara	290	70.927	0,0040887	91,12	5	1	5
Boliyohuto ²	248	55.268	0,0044872	100,00	5	1	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

13. Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas

Pada indikator ini, calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh rasio sebesar 0,0064 dengan skor dan nilai 4 bersama-sama dengan Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango. Sementara untuk kabupaten induk (Kabupaten Gorontalo) memperoleh rasio paling rendah dengan skor dan nilai 1. Rasio paling tinggi diperoleh Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,0085 dengan skor dan nilai 5.

Tabel 32. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Pekerja S-1	Jumlah Penduduk ≥25 tahun	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	365	64.051	0,0056986	66,44	4	1	4
Gorontalo ¹	221	173.811	0,0012715	14,83	1	1	1
Pohuwato	249	61.859	0,0040253	46,93	3	1	3
Bone Bolango	372	67.446	0,0055155	64,31	4	1	4
Gorontalo Utara	449	52.352	0,0085766	100,00	5	1	5
Boliyohuto ²	255	39.979	0,0063783	74,37	4	1	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

14. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk

Indikator rasio pegawai negeri sipil (PNS) terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 0,012 dengan skor dan nilai 3. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk), skor dan nilainya masih lebih tinggi sebesar 4. Sedangkan rasio paling tinggi diperoleh Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango dengan skor dan nilai 5.

Tabel 33. Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah PNS	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	1.250	128.495	0,0096828	36,05	2	1	2
Gorontalo ¹	5.662	266.659	0,0212331	79,06	4	1	4
Pohuwato	3.323	116.227	0,0268577	100,00	5	1	5
Bone Bolango	3.400	131.797	0,0261488	97,36	5	1	5
Gorontalo Utara	871	96.506	0,0091514	34,07	2	1	2
Boliyohuto ²	890	73.811	0,0120578	44,90	3	1	3

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

d. Faktor Kemampuan Keuangan

Beberapa indikator yang digunakan dalam menilai faktor kemampuan keuangan daerah pada kajian ini terdiri dari: indikator jumlah penerimaan daerah sendiri (PDS), jumlah PDS terhadap jumlah penduduk, dan jumlah PDS terhadap PDRB non migas.

1. Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS)

Pada indikator ini, calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh skor 3 dengan nilai 15. Sementara Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan skor 2 dan nilai 10 (Tabel 34). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) merupakan kabupaten dengan nilai tertinggi (25) bersama Kabupaten Pohuwato.

Tabel 34. Indikator Jumlah Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	PDS (Rp)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	66.077.846.200	69,28	4	5	20
Gorontalo ¹	95.383.722.285	100,00	5	5	25
Pohuwato	86.921.736.000	91,13	5	5	25
Bone Bolango	35.099.578.374	36,80	2	5	10
Gorontalo Utara	31.677.883.411	33,21	2	5	10
Boliyohuto ²	47.691.861.143	50,00	3	5	15

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

2. Jumlah penerimaan PDS terhadap Jumlah Penduduk

Indikator jumlah penerimaan PDS terhadap jumlah penduduk di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 646.134,87 dengan skor 5 dan nilai 25 bersama dengan Kabupaten Pohuwato (Tabel 35). Sedangkan rasio terendah diperoleh Kabupaten Bone Bolango yang hanya 269.944,84 dengan skor 2 dan nilai 10 saja.

Tabel 35. Indikator Jumlah PDS terhadap Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	PDS (Rp)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	66.077.846.200	128.495	511.854,42	72,86	4	5	20
Gorontalo ¹	95.383.722.285	266.659	359.684,76	51,20	3	5	15
Pohuwato	86.921.736.000	116.227	702.534,12	100,00	5	5	25
Bone Bolango	35.099.578.374	131.797	269.944,84	38,42	2	5	10
Gorontalo Utara	31.677.883.411	96.506	332.831,29	47,38	3	5	15
Boliyohuto ²	47.691.861.143	73.811	646.134,87	91,97	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

3. Jumlah Penerimaan PDS terhadap PDRB Non Migas

Indikator jumlah penerimaan PDS terhadap PDRB non migas di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto menunjukkan rasio sebesar 151.316,66 dengan skor 4 dan nilai 20 (Tabel 36). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk mempunyai skor dan nilai tertinggi bersama Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato yang masing-masing sebesar 5 dan nilai 25.

Tabel 36. Indikator Jumlah PDS terhadap PDRB Non Migas Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	PDS (Rp)	PDRB non Migas (Rp)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	66.077.846.200	310.754	212.637,15	100,00	5	5	25
Gorontalo ¹	95.383.722.285	461.932	206.488,70	97,11	5	5	25
Pohuwato	86.921.736.000	484.957	179.235,97	84,29	5	5	25
Bone Bolango	35.099.578.374	264.016	132.944,89	62,52	4	5	20
Gorontalo Utara	31.677.883.411	196.996	160.804,70	75,62	4	5	20
Boliyohuto ²	47.691.861.143	338.750	140.787,75	66,21	4	5	20

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

e. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya terdiri dari: rasio peribadatan, rasio fasilitas olah raga, dan rasio balai pertemuan umum yang dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan PP No.78 Tahun 2007. Uraian secara detail disajikan di bawah ini:

1. Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk

Indikator rasio sarana peribadatan di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 28,451 dengan skor 5 dan nilai 10 bersama-sama Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan nilai tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo (Tabel 37). Sementara kabupaten sisa, termasuk Kabupaten Gorontalo dengan nilai 8.

Tabel 37. Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Sarana Ibadah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	350	128.495	27,11182	95,29	5	2	10
Gorontalo ¹	566	266.659	21,22561	74,60	4	2	8
Pohuwato	274	116.227	22,14571	77,84	4	2	8
Bone Bolango	261	131.797	20,07306	70,55	4	2	8
Gorontalo Utara	249	96.506	26,16178	91,95	5	2	10
Boliyohuto ²	210	73.811	28,45104	100,00	5	2	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

2. Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk

Indikator rasio fasilitas olah raga di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 90,77238 dengan skor 5 dan nilai 10 bersama dengan Kabupaten Induk dan Kabupaten Bone Bolango (Tabel 38). Sementara Kabupaten sisa memperoleh skor 4 dan nilai 8.

Tabel 38. Indikator Rasio Fasilitas Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Sarana Olahraga	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	975	128.495	75,52578	77,26	4	2	8
Gorontalo ¹	2.154	266.659	80,77732	82,64	5	2	10
Pohuwato	849	116.227	68,61937	70,20	4	2	8
Bone Bolango	1.271	131.797	97,75043	100,00	5	2	10
Gorontalo Utara	673	96.506	70,71036	72,34	4	2	8
Boliyohuto ²	670	73.811	90,77238	92,86	5	2	10

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

3. Jumlah Balai Pertemuan

Indikator rasio jumlah balai pertemuan umum (BPU) di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 8,67079 dengan skor 4 dan nilai 4 (Tabel 39) bersama-sama Kabupaten Pohuwato. Sedangkan rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Bone Bolango dengan skor dan nilai 5.

Tabel 39. Indikator Jumlah Balai Pertemuan Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Sarana BPU	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	93	128.495	7,20400	54,46	3	1	3
Gorontalo ¹	188	266.659	7,05020	53,30	3	1	3
Pohuwato	110	116.227	8,89061	67,21	4	1	4
Bone Bolango	172	131.797	13,22823	100,00	5	1	5
Gorontalo Utara	63	96.506	6,61925	50,04	3	1	3
Boliyohuto ²	64	73.811	8,67079	65,55	4	1	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

f. Faktor Sosial Politik

Pada faktor ini terdiri dari dua indikator yang dinilai, yaitu indikator penduduk yang ikut pemilu legislatif dan jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan uraian berikut ini:

1. Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif terhadap Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih

Indikator rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 8.572 dan bersama kabupaten lain termasuk Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk merupakan skor dan nilai tertinggi (5 dan 15). Rasio paling rendah diperoleh Kabupaten Boalemo yang hanya sebesar 8,233 (Tabel 40).

Tabel 40. Indikator Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu Legislatif terhadap Jumlah Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih

Kabupaten	Jumlah Pemilih	Jumlah Penduduk >17 tahun	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	82.805	100.583	8.233	90,10	5	3	15
Gorontalo ¹	184.688	210.067	8.792	96,22	5	3	15
Pohuwato	83.943	96.107	8.734	95,59	5	3	15
Bone Bolango	93.142	101.935	9.137	100,00	5	3	15
Gorontalo Utara	71.042	81.846	8.680	94,99	5	3	15
Boliyohuto ²	53.711	62.657	8.572	93,81	5	3	15

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: KPU Kabupaten dan Provinsi Gorontalo;

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Indikator persentase jumlah ormas di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 23,36% dengan skor 2 dan nilai 4 bersama-sama Kabupaten Boalemo dan Pohuwato (Tabel 41). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) bersama Kabupaten Bone Bolango mempunyai persentase tertinggi dengan skor 5 dan nilai 10.

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

Tabel 41. Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Jumlah Ormas	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	30	21,90	2	2	4
Gorontalo	122	89,05	5	2	10
Pohuwato	4	30,66	2	2	4
Bone Bolango	137	100,00	5	2	10
Gorontalo Utara	56	40,88	3	2	6
Boliyohuto	32	23,36	2	2	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Ormas=organisasi kemasyarakatan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

g. Faktor Luas Daerah

Faktor ini terdapat dua indikator, yaitu luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif. Luas keseluruhan merupakan wilayah yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Sedangkan luas efektif hanya berupa kawasan budidaya saja.

1. Luas Wilayah Keseluruhan

Pada indikator ini, calon Kabupaten Boliyohuto hanya memperoleh skor 1 dan nilai 2 dan hanya berbeda 2 digit di bawah kabupaten induk (Kabupaten Gorontalo) dan Kabupaten Bone Bolango dengan skor 3 dan nilai 6 (Tabel 42). Skor dan nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Pohuwato (5 dan 10) karena luas wilayahnya yang besar.

Tabel 42. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Keseluruhan (km ²)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2.567,36	60,49	4	2	8
Gorontalo ¹	1.475,62	34,77	3	2	6
Pohuwato	4.244,31	100,00	5	2	10
Bone Bolango	1.984,31	46,75	3	2	6
Gorontalo Utara	1.230,07	28,98	2	2	4
Boliyohuto ²	648,98	15,29	1	2	2

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

2. Luas Wilayah Efektif

Indikator persentase luas wilayah efektif calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 26,15% dengan skor 3 dan nilai 9 (Tabel 43). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk memperoleh skor 3 dan nilai 9. Skor dan nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Pohuwato yang memperoleh skor 5 dengan nilai 15. Skor dan nilai paling rendah diperoleh Kabupaten Gorontalo Utara yang skornya hanya 2 dan nilai 6.

Tabel 43. Indikator Luas Wilayah Efektif Calon Kabupaten Boliyohuto dan Lain

Kabupaten	Efektif (km ²)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	494,68	45,25	3	3	9
Gorontalo ¹	860,62	78,72	3	3	9
Pohuwato	1.093,31	100,00	5	3	15
Bone Bolango	658,31	60,21	4	3	12
Gorontalo Utara	612,07	55,98	1	3	3
Boliyohuto ²	439,62	40,21	3	3	9

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

h. Faktor Pertahanan

Pada faktor ini, terdapat dua indikator yang diukur, yaitu rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah dan karakteristik wilayah. Masing-masing indikator ini diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan terhadap Luas Wilayah

Rasio jumlah personil pertahanan (TNI) di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sampai tahun 2010 mencapai 0,318 dan merupakan rasio tertinggi di wilayah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan rasio ini, maka skor dan nilainya menjadi yang tertinggi, yaitu 5 dan 15. Sementara, rasio aparat pertahanan kabupaten induk dan Kabupaten Gorontalo Utara relatif sama dengan nilai 9. Hal ini disebabkan luas wilayah kedua kabupaten merupakan yang terluas, apalagi Kabupaten pohuwato sebagai kabupaten dengan luas wilayah terbesar di provinsi ini.

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Tabel 44. Indikator Jumlah Personil Pertahanan

Kabupaten	Luas (km ²)	Personil	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	2.567,36	207	0,0805163	25,28	2	3	6
Gorontalo ¹	1.475,62	207	0,1400864	43,98	3	3	9
Pohuwato	4.244,31	207	0,0487039	15,29	1	3	3
Bone Bolango	1.984,31	207	0,1041744	32,71	2	3	6
Gorontalo Utara	1.230,07	207	0,1680508	52,76	3	3	9
Boliyohuto ²	648,98	207	0,3185218	100,00	5	3	15

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

2. Karakteristik Wilayah

Pada indikator ini, semua kabupaten termasuk calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh skor yang sama, yaitu 2 dan nilai 4 karena semua kabupaten ini merupakan daratan dan tidak berbatasan langsung dengan Negara lain (Tabel 45). Namun ada beberapa pertimbangan dan menjadi isu strategis terhadap semua kabupaten ini, yaitu:

- Semua kabupaten ini mempunyai wilayah pesisir laut yang merupakan pintu masuk segala jenis dan bentuk hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HTAG) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas keamanan dan akhirnya akan mempengaruhi kegiatan seluruh sektor kehidupan, terutama ekonomi, politik, sosial, dan budaya nasional. Wilayah pesisir utara yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Gorontalo Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Sedangkan wilayah pesisir selatan yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Pohuwato, Boalemo, calon Kabupaten Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang berhadapan langsung dengan Teluk Tomini.
- Wilayah Barat jazirah Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Pohuwato, Boalemo, calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Gorontalo dilalui jalur jalan trans Sulawesi yang merupakan jalur strategis nasional pemacu perekonomian regional Sulawesi dan Nasional.
- Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Pohuwato merupakan sentra utama kawasan transmigrasi nasional yang sudah ada sejak Provinsi Gorontalo masih berada dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara sampai sekarang. Keragaman etnik dan suku yang ada di kedua wilayah tersebut terutama di wilayah calon Kabupaten Bolitohuto merupakan modal positif dalam pembangunan sekaligus berpotensi negatif (konflik) jika pengelolaannya tidak dilakukan secara arif dan bijaksana sebagaimana pengalaman di daerah-daerah lain.
- Kesenjangan ekonomi dan sosial merupakan permasalahan klasik dan sistemik yang harus segera mendapatkan prioritas penanganannya, terutama yang mengarah pada konflik akibat keterbatasan peluang dan akses terhadap sumberdaya. Suasana kondusif merupakan faktor utama keberagannya seluruh aktifitas sektor, sehingga optimalisasi sumberdaya dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan lancar, aman dan terkendali.

Tabel 45. Indikator Karakteristik Wilayah Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten	Karakteristik	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Gorontalo ¹	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Pohuwato	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Bone Bolango	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Gorontalo Utara	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4
Boliyohuto ²	Daratan dan tidak berbatasan dengan Negara lain	2	2	4

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

i. Faktor Keamanan

Pada faktor keamanan ini hanya terdapat satu indikator yang diukur, yaitu rasio personil kemananan terhadap jumlah penduduk. Aparat keamanan yang dimaksud dalam indikator ini adalah personil kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di setiap wilayah atau kabupaten dan diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk

Indikator rasio personil keamanan di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sebesar 0,00045 dengan skor 1 dan nilai 5. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk menempati urutan kedua dengan rasio 0,0019 dengan skor 4 dan nilai 20 (Tabel 46). Sedangkan rasio tertinggi diperoleh tiga kabupaten sisa dengan skor 5 dan nilai 25, kecuali Kabupaten Gorontalo Utara yang masih dalam wilayah Hukum Kepolisian Resort Limboto.

Tabel 46. Indikator Rasio Personil Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)	Personil	Rasio	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Boalemo	128.495	349	0,0027034	85,55	5	5	25
Gorontalo ¹	266.659	524	0,0019651	62,18	4	5	20
Pohuwato	116.227	391	0,0031602	100,00	5	5	25
Bone Bolango	131.797	364	0,0027995	88,58	5	5	25
Gorontalo Utara	96.506	221	0,0023220	73,48	4	5	20
Boliyohuto ²	73.811	34	0,0004606	14,58	1	5	5

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

j. Faktor Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Pada faktor tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks ini merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang (*longevity*) dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketrampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Uraian lebih detail tentang IPM disajikan berikut ini.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator IPM untuk wilayah calon Kabupaten Boliyohuto menempati urutan ketiga sebagai IPM tertinggi kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo dengan kontribusi sebesar 98,87% dan hanya selisih 1,13 digit dengan Kabupaten Bone Bolango sebagai kabupaten dengan IPM tertinggi dan Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) yang masing-masing sebesar 100% dan 99,99% (Tabel III-37). Kabupaten sisa kontribusinya masih lebih besar 80%, sehingga semua kabupaten memperoleh skor dan nilai sama, yaitu skor 5 dan nilai 25.

Tabel 47. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Kabupaten/Kota	IPM	Kontribusi (%)	Skor	Bobot	Nilai
Boalemo	66,45	96,82	5	5	25
Gorontalo ¹	67,94	98,99	5	5	25
Pohuwato	67,42	98,23	5	5	25
Bone Bolango	68,64	100,00	5	5	25
Gorontalo Utara	64,41	93,85	5	5	25
Boliyohuto ²	67,86	98,87	5	5	25

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

Data IPM tersebut, walaupun semua kabupaten termasuk calon Kabupaten Boliyohuto memperoleh nilai 25 (tertinggi), tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat 15 kecamatan yang tergolong kecamatan dengan IPM terendah. Diantara 15 kecamatan tersebut, terdapat dua kecamatan di wilayah calon Kabupaten Boliyohuto yang tergolong IPM rendah (Kecamatan Boliyohuto IPM 65,9 urutan 32 dan Kecamatan Mootilango IPM 65,1 urutan 36), sebagaimana ulasan pada bab II. Upaya pembentukan kabupaten baru ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan IPM pada semua kecamatan dengan IPM terendah, tidak terkecuali kedua kecamatan di wilayah calon kabupaten ini.

k. Faktor Rentang Kendali

Pada faktor ini, terdapat dua indikator yang menjadi tolok ukur penilaian, yaitu rata-rata jarak kabupaten ke ibu kota provinsi dan rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten ke ibu kota provinsi. Uraian masing-masing indikator disajikan berikut ini.

1. Rata-Rata Jarak Kabupaten ke Pusat Pemerintahan (Ibukota Provinsi)

Indikator jarak calon Kabupaten Boliyohuto ke pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi (Kota Gorontalo) persentasenya sebesar 35,44% yang memperoleh skor 2 dan nilai 4 bersama dengan Kabupaten Gorontalo Utara (Tabel III-38). Sementara untuk Kabupaten Gorontalo (kabupaten induk) bersama dengan Kabupaten Bone Bolango persentasenya paling rendah karena memang jaraknya yang relatif dekat sebesar 10,13% dan 8,86%. Persentase jarak yang paling tinggi diperoleh Kabupaten Pohuwato sebesar 100% dengan skor 5 dan nilai 10. Sedangkan Kabupaten Boalemo persentasenya sebesar 66,46%.

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

Tabel 48. Indikator Rata-Rata Jarak Kabupaten ke Ibukota Provinsi Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Rentang Kendali/Kabupaten	Jarak (km ²)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Gorontalo-Tilamuta (Boalemo)	105	66,46	4	2	8
Gorontalo-Limboto (Gorontalo) ¹	16	10,13	1	2	2
Gorontalo-Marisa (Pohuwato)	158	100,00	5	2	10
Gorontalo-Suwawa (Bone Bolango)	14	8,86	1	2	2
Gorontalo-Kwandang (Gorontalo Utara)	57	36,08	2	2	4
Gorontalo-Tolangohula (Boliyohuto) ²	76	48,10	3	2	6

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

2. Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten ke Pusat Pemerintahan

Indikator rata-rata waktu perjalanan dari calon Kabupaten Boliyohuto menuju ibu kota provinsi persentasenya sebesar 70% dengan skor 4 dan nilai 12 yang sama dengan Kabupaten Gorontalo Utara (Tabel III-39). Sementara persentase paling rendah diperoleh dua kabupaten yang dengan indikator rata-rata jarak kabupaten menuju ibu kota provinsi.

Tabel III-39. Indikator Rata-Rata Waktu Perjalanan dari Kabupaten ke Ibukota Provinsi Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain

Rentang Kendali/Kabupaten	Waktu (jam)	Persentase (%)	Skor	Bobot	Nilai akhir
Gorontalo-Tilamuta (Boalemo)	2,50	83,33	5	3	15
Gorontalo-Limboto (Gorontalo) ¹	0,50	16,67	1	3	3
Gorontalo-Marisa (Pohuwato)	3,00	100,00	5	3	15
Gorontalo-Suwawa (Bone Bolango)	0,25	8,33	1	3	3
Gorontalo-Kwandang (Gorontalo Utara)	2,00	66,67	4	3	12
Gorontalo-Tolangohula (Boliyohuto) ²	2,10	70,00	4	3	12

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun Kelayakan Akademik (2010).

3.5 Rekapitulasi Faktor Persyaratan Teknis Pembentukan Kabupaten

Berdasarkan nilai masing-masing indikator dalam setiap faktor yang menjadi persyaratan teknis pembentukan kabupaten, maka calon Kabupaten Boliyohuto mempunyai total nilai akhir sebesar 397 dan menempati urutan ke tiga sebagai kabupaten yang **mampu** serta **direkomendasikan** untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru (Tabel 40). Total nilai akhir tertinggi diperoleh Kabupaten Boalemo dengan nilai sebesar 407. Sementara Kabupaten Gorontalo sebagai kabupaten induk memperoleh nilai sebesar 406 yang masih termasuk mampu serta tetap dipertahankan sebagai sebuah kabupaten mandiri. Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara masing-masing memperoleh nilai 387 dan 363. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango berada pada titik kritis sebagai sebuah kabupaten dengan total nilai 326 (syarat mampu sebesar 340 sesuai PP no. 78 tahun 2007).

Tabel 40. Rekapitulasi Faktor Persyaratan Teknis Calon Kabupaten Boliyohuto dan Kabupaten Lain se-Provinsi Gorontalo

Faktor	Nilai Faktor Kabupaten					
	Boalemo	Gorontalo ¹	Pohuwato	Bone Bolango	Gorontalo Utara	Boliyohuto ²
Kependudukan	85	100	35	40	90	80
Kemampuan Ekonomi	60	60	75	65	55	70
Potensi Daerah	57	57	56	50	50	68
Kemampuan Keuangan	65	65	75	40	45	60
Sosial Budaya	21	21	20	23	21	24
Sosial Politik	19	25	19	25	21	19
Luas Daerah	17	15	25	18	7	11
Pertahanan	10	13	7	10	13	19
Keamanan	25	20	25	25	20	5
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	25	25	25	25
Rentang Kendali	23	5	25	5	16	18
Nilai Akhir	407	406	387	326	363	399

¹ Kabupaten Induk

² Calon Kabupaten yang Diusulkan

Tim Penyusun

Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

Ringkasan Eksekutif

Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011

3.6 Persyaratan Fisik Kewilayahan

a. Cakupan Wilayah Kabupaten

Calon Kabupaten Boliyohuto secara administratif terdiri dari lima kecamatan definitif. Kelima kecamatan definitif tersebut terdiri dari:

1. Kecamatan Boliyohuto
Boliyohuto merupakan kecamatan induk dari empat kecamatan definitif di wilayah Kabupaten Boliyohuto yang saat ini terdiri dari 13 desa, yang meliputi Desa Sidomulyo, Sidodadi, Bandung Rejo, Diloniyohu, Potanga, Parungi, Monggolito, Iloheluma, Dulohupa, Sidomulyo Selatan, Bongongoayu, Tolite, dan Desa Motoduto.
2. Kecamatan Mootilango
Mootilango merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Boliyohuto. Saat ini, Kecamatan Mootilango terdiri dari 10 desa yang terdiri dari Desa Paris, Satria, Karyamukti, Sidomukti, Talumopatu, Payu, Pilomonu, Helumo, Sukamaju, dan Desa Huyula.
3. Kecamatan Tolangohula
Tolangohula merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Boliyohuto bersama-sama dengan Kecamatan Mootilango. Saat ini, Kecamatan Tolangohula terdiri dari 15 desa yang meliputi Desa Sukamakmur, Gandasari, Molohu, Lakeya, Bina Jaya, Sidoarjo, Sukamakmur Utara, Tamaila, Polohungo, Margomulyo, Makmur Abadi, Gandaria, Ombulotango, Tamaila Utara, dan Desa Himalaya.
4. Kecamatan Asparaga
Asparaga merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Tolangohula. Saat ini, Kecamatan Asparaga terdiri dari 10 desa, yaitu: Desa Mohiolo, Bululi, Pangahu, Karya Indah, Tiohu, Prima, Olimohu, Bontula, Karya Baru, dan Desa Bihe.
5. Kecamatan Bilato
Bilato merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Boliyohuto. Saat ini, Kecamatan Bilato terdiri dari 10 desa, yaitu: Desa Totopo, Bilato, Ilomata, Taulaa, Juriya, Pelehu, Bumela, Musyawah, Lamahu, dan Desa Suka Damai.

b. Aspek Persyaratan Teknis Calon Ibu Kota

Penilaian calon ibu kota Kabupaten Boliyohuto didasarkan pada empat aspek penilaian utama, yaitu: aspek ruang, aspek kependudukan, aspek potensi daerah dan aspek sosial budaya. Pada masing-masing aspek terdiri dari indikator dan sub indikator penilaian sebagaimana ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan PP No.78 Tahun 2007. Rekapitulasi masing-masing aspek disajikan sebagai berikut:

Tabel 41. Rekapitulasi Aspek Persyaratan Teknis Calon Ibukota Kabupaten Boliyohuto

No	Kecamatan	Aspek Ruang	Aspek Jumlah Penduduk	Aspek Potensi Daerah	Aspek Sosial Budaya	Rata-Rata Indeks	Rangking
1	Boliyohuto	67,96	89,53	83,58	90,83	82,98	II
2	Mootilango	87,63	78,75	47,26	69,17	70,70	III
3	Tolangohula	66,76	83,24	87,40	100,00	84,35	I
4	Asparaga	65,60	64,16	37,56	29,17	49,12	V
5	Bilato	80,51	68,24	39,92	20,00	52,17	IV

Berdasarkan empat aspek penilaian dalam persyaratan teknis calon ibu kota Kabupaten Boliyohuto, maka nilai rata-rata indeks tertinggi diperoleh **Kecamatan Tolangohula** sebesar 84,35 dan menempati peringkat I sebagai calon ibu kota Kabupaten Boliyohuto (Tabel 41). Sedangkan nilai indek terendah diperoleh Kecamatan Asparaga yang hanya sebesar 49,12 yang menempatkan kecamatan ini sebagai peringkat V.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- a. Berdasarkan persyaratan teknis pembentukan kabupaten, maka calon **Kabupaten Boliyohuto** mempunyai total nilai akhir sebesar **399** dan **mampu** serta **direkomendasikan** untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru.
- b. Berdasarkan persyaratan fisik wilayah, maka untuk syarat cakupan wilayah calon Kabupaten Boliyohuto sudah mempunyai 5 (**lima**) **kecamatan definitif**. Dengan demikian, maka calon Kabupaten Boliyohuto layak untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru.
- c. Berdasarkan persyaratan fisik wilayah, untuk syarat calon ibu kota Kabupaten Boliyohuto, maka calon ibu kota Kabupaten Boliyohuto yang diusulkan adalah wilayah **Kecamatan Tolangohula**.

Tim Penyusun

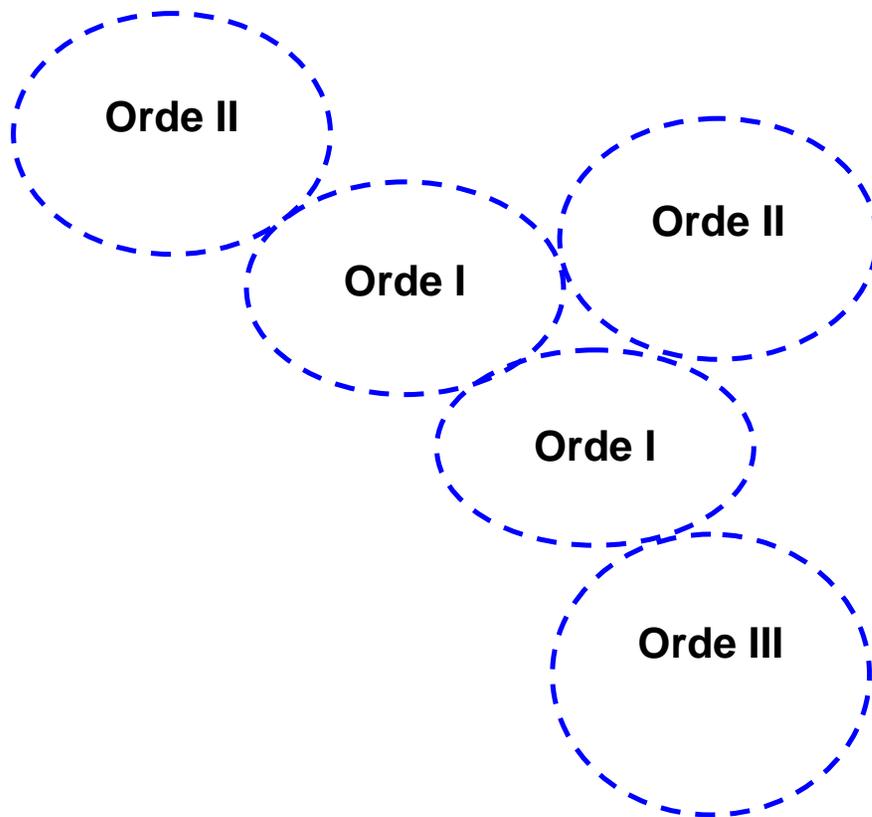
Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo



Ringkasan Eksekutif

*Kajian Daerah
Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Tahun 2011*

**PETA
HIRARKI (ORDE) PENGEMBANGAN
WILAYAH CALON KABUPATEN
BOLIOHUTO**



Tim Penyusun

*Kajian Daerah Pembentukan Kabupaten Boliyohuto
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*

